

SIARAN PERS

Nomor : 05/HMS/SP/VII/2026

Tanggal : 28 Juli 2026

Lindungi Integritas Pemilu di Era Digital, Bawaslu Dorong Cyber Election Monitoring

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendorong pengembangan **Cyber Election Monitoring** sebagai paradigma baru pengawasan pemilu dalam menghadapi semakin kompleksnya tantangan demokrasi digital. Gagasan tersebut menjadi salah satu fokus utama yang disampaikan Anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi, **Dr. Puadi, S.Pd., M.M.**, dalam kegiatan **Bawaslu Campus Connect: Generasi Digital, Demokrasi Transparan** yang diselenggarakan di Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Puadi, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, mengakses informasi politik, hingga menentukan pilihan politiknya. Jika pada masa lalu kampanye dan kontestasi politik berlangsung dominan di ruang fisik, kini sebagian besar percakapan politik berpindah ke ruang digital yang bergerak sangat cepat dan sulit dibatasi oleh ruang maupun waktu.

“Demokrasi hari ini sudah memasuki ruang digital. Kampanye tidak lagi hanya di lapangan, tetapi sudah berlangsung di TikTok, Instagram, YouTube, dan berbagai platform digital lainnya. Karena itu, Bawaslu tidak bisa lagi mengawasi dengan cara lama. Jika hoaks bisa menyebar ke jutaan orang dalam satu menit, maka pengawasan pemilu juga harus bergerak secepat itu secara digital,” ujar Puadi.

Ia menjelaskan bahwa pergeseran demokrasi ke ruang digital membawa konsekuensi besar terhadap model pengawasan pemilu. Ancaman terhadap integritas pemilu tidak lagi terbatas pada praktik-praktik pelanggaran konvensional, tetapi berkembang menjadi serangan informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik secara masif.

“Tantangan terbesar kami saat ini bukan hanya pelanggaran di TPS, tetapi serangan informasi di ruang digital, mulai dari hoaks, ujaran kebencian, hingga *deepfake* dan manipulasi video berbasis AI. Ini ancaman serius bagi persepsi publik, dan kami harus hadir untuk melindungi integritas informasi pemilu,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Bawaslu menilai bahwa pengawasan pemilu ke depan harus bergerak menuju pendekatan yang lebih adaptif melalui **Cyber Election Monitoring**, yakni sistem pengawasan yang mampu memantau, mendeteksi, menganalisis, dan merespons berbagai ancaman yang muncul di ruang siber secara cepat, berbasis data, dan didukung teknologi digital.



@Bawasluri



Bawaslu RI



@Bawaslu_RI



Bawaslu RI



www.bawaslu.go.id

Puadi menjelaskan bahwa ancaman terbesar pemilu masa depan bukan semata manipulasi suara, melainkan manipulasi persepsi. Kemajuan teknologi memungkinkan penyebaran hoaks secara masif, penggunaan akun tidak autentik untuk menggiring opini publik, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menciptakan konten palsu yang sulit dibedakan dari informasi asli.

Karena itu, menurutnya, pengawasan pemilu tidak lagi cukup mengandalkan laporan yang datang setelah pelanggaran terjadi. Pengawasan harus mampu bergerak lebih cepat melalui analisis data, sistem peringatan dini, dan pemantauan ruang digital secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Bawaslu telah membangun berbagai instrumen digital yang menjadi fondasi menuju pengawasan pemilu berbasis teknologi. Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Sistem Informasi Pelaporan Masyarakat (SiGapLapor), serta Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) menjadi instrumen penting dalam mendukung pengawasan yang lebih efektif dan terukur.

“Kami telah membangun ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari Siwaslu untuk pengawasan, SiGapLapor untuk aduan masyarakat, hingga IKP atau Indeks Kerawanan Pemilihan. Dengan IKP, kami tidak lagi nebak-nebak. Kami memetakan wilayah rawan berbasis data sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Puadi, Cyber Election Monitoring tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang membangun budaya demokrasi digital yang sehat. Oleh karena itu, Bawaslu menempatkan kolaborasi sebagai elemen penting dalam pengembangan sistem pengawasan masa depan.

Melalui program **Bawaslu Campus Connect: Generasi Digital, Demokrasi Transparan**, Bawaslu mengajak perguruan tinggi menjadi mitra strategis dalam memperkuat pengawasan partisipatif berbasis data dan teknologi. Program ini dirancang untuk mendorong mahasiswa menjadi bagian dari ekosistem pengawasan pemilu yang modern dan adaptif terhadap perkembangan digital.

Mahasiswa didorong untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi agen literasi digital, pemeriksa fakta (*fact-checker*), peneliti kepemiluan, dan pengawas partisipatif yang mampu menjaga kualitas ruang publik digital.

“Melalui program Bawaslu Campus Connect, kami mengajak mahasiswa bukan sekadar menjadi pengguna media sosial, tetapi menjadi agen literasi dan pengawas partisipatif. Mulailah dari hal sederhana, seperti tidak menyebarkan hoaks, melakukan *fact-check*, dan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran. Kualitas demokrasi ke depan sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya,” ujar Puadi.

Dalam kesempatan tersebut, Puadi juga memaparkan lima agenda strategis Bawaslu dalam menghadapi tantangan demokrasi digital menuju Pemilu 2029. Kelima agenda tersebut meliputi penguatan regulasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas yang melek teknologi, optimalisasi pemanfaatan kecerdasan buatan, pengembangan sistem Cyber Election Monitoring, serta penguatan kolaborasi dengan kampus, masyarakat sipil, media massa, dan platform digital.

“Kami memiliki lima agenda besar ke depan: memperkuat regulasi digital, meningkatkan SDM pengawas yang melek teknologi, memaksimalkan AI, mengembangkan pemantauan dunia maya atau Cyber Election Monitoring, serta memperkuat kolaborasi dengan kampus dan platform digital. Transformasi ini tidak akan berhasil jika dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi seluruh pihak,” katanya.

Kegiatan Bawaslu Campus Connect juga menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi yang membahas berbagai isu strategis terkait demokrasi digital, mulai dari kolaborasi kampus dalam penguatan demokrasi partisipatif, etika digital dalam kontestasi politik, inovasi teknologi pengawasan pemilu, tantangan integritas pemilu di era siber, hingga keterbukaan data dan informasi publik.

Bawaslu meyakini bahwa perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam membangun kapasitas generasi muda untuk menghadapi tantangan demokrasi digital. Kampus dapat menjadi pusat pengembangan literasi digital, laboratorium inovasi pengawasan pemilu, sekaligus ruang pembentukan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Menutup paparannya, Puadi menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu di lapangan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ruang digital dari berbagai bentuk manipulasi informasi.

“Saya ingin meninggalkan satu pesan: teknologi dapat memperkuat demokrasi, tetapi hanya jika digunakan secara etis, diawasi secara transparan, dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Pemilu 2029 tidak hanya ditentukan oleh siapa yang datang ke TPS, tetapi oleh siapa yang mampu menjaga ruang digital kita tetap sehat,” pungkasnya.

Melalui penguatan Cyber Election Monitoring dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, Bawaslu berharap mampu membangun sistem pengawasan pemilu yang lebih modern, prediktif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan secara transparan, berintegritas, dan berkeadilan di era digital.

.

Biro Hukum dan Humas
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jl. M.H. Thamrin No.14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. (021) 2301515 | Email: humasbawasluri@bawaslu.go.id



@Bawasluri



Bawaslu RI



@Bawaslu_RI



Bawaslu RI



www.bawaslu.go.id